



SKRIPSI

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN OTONOMI DAERAH MENYANGKUT
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI KECAMATAN SEBAGAI
PERANGKAT DAERAH MENURUT PERATURAN PEMERINTAH
NOMOR 19 TAHUN 2008 TENTANG KECAMATAN**

*IMPLEMENTASION OF DECENTRALIZATION POLICY ABOUT STATE, DUTY
AND FUNGSION OF SUB DISTRICT LAW AS SETS OF DISTRICT OF
GOVERMENT LAW NUMBER 19 OF 2008 ABOUT SUB DISTRICT*

**AHMAD SUFYAN
NIM 090710101186**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2014**

SKRIPSI

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN OTONOMI DAERAH MENYANGKUT
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI KECAMATAN SEBAGAI
PERANGKAT DAERAH MENURUT PERATURAN PEMERINTAH
NOMOR 19 TAHUN 2008 TENTANG KECAMATAN**

*IMPLEMENTATION OF DECENTRALIZATION POLICY ABOUT STATE, DUTY
AND FUNCTION OF SUB DISTRICT LAW AS SETS OF DISTRICT OF
GOVERNMENT LAW NUMBER 19 OF 2008 ABOUT SUB DISTRICT*

**AHMAD SUFYAN
NIM 090710101186**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2014**

MOTTO

“Jadikan deritaku ini sebagai kesaksian, bahwa kekuasaan seorang Presiden sekalipun ada batasnya. Karena kekuasaan yang langgeng hanyalah kekuasaan rakyat. Dan di atas segalanya adalah kekuasaan Tuhan Yang Maha Esa.”¹

(Soekarno)

¹ Roso Daras, Bung Karno (*Serpihan Sejarah Yang Tercecer*), Imania, Depok, 2010.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua saya, Ayahanda Ahmad Ja'far S.Ag dan Ibunda Siti Yakuti yang tercinta atas kasih sayang, doa, nasihat, dan dukungan serta pengorbanan yang tulus;
2. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang saya banggakan;
3. Guru-guru saya sejak Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), serta para dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat bagi perkembangan akademik saya.

SKRIPSI

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN OTONOMI DAERAH MENYANGKUT
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI KECAMATAN SEBAGAI
PERANGKAT DAERAH MENURUT PERATURAN PEMERINTAH
NOMOR 19 TAHUN 2008 TENTANG KECAMATAN**

*IMPLEMENTATION OF DECENTRALIZATION POLICY ABOUT STATE, DUTY
AND FUNCTION OF SUB DISTRICT LAW AS SETS OF DISTRICT OF
GOVERNMENT LAW NUMBER 19 OF 2008 ABOUT SUB DISTRICT*

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S1)
dan mencapai gelar Sarjana Hukum

**AHMAD SUFYAN
NIM 090710101186**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
JEMBER
2014**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 11 September 2014**

Oleh:
Pembimbing

Antikowati, S.H., M.H.
NIP. 196112021988022001

Pembantu Pembimbing

Rosita Indrayati, S.H., M.H.
NIP. 197805312005012001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul:

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN OTONOMI DAERAH MENYANGKUT
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI KECAMATAN SEBAGAI
PERANGKAT DAERAH MENURUT PERATURAN PEMERINTAH
NOMOR 19 TAHUN 2008 TENTANG KECAMATAN**

*IMPLEMENTASION OF DECENTRALIZATION POLICY ABOUT STATE, DUTY
AND FUNGSION OF SUB DISTRICT LAW AS SETS OF DISTRICT OF
GOVERMENT LAW NUMBER 19 OF 2008 ABOUT SUB DISTRICT*

Oleh:

Ahmad Sufyan
NIM 090710101186

Pembimbing,

Antikowati, S.H., M.H
NIP.196112021988022001

Pembantu Pembimbing,

Rosita Indrayati S.H., M.H.
NIP. 197805312005012001

Mengesahkan:

**Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan,**

Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum.
NIP. 197105011993031001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 02

Bulan : Oktober

Tahun : 2014

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji

Ketua,

Sekretaris,

R.A Rini Anggraini S.H.,M.H.

NIP : 195911151985122001

Ida Bagus Oka Ana S.H.,M.M.

NIP : 196011221989021001

Anggota Penguji

1. **Antikowati,S.H.,M.H**
NIP. 196112021988022001

.....

2. **Rosita Indrayati, S.H., M.H.**
NIP. 197805312005012001

.....

PERNYATAAN

Saya sebagai penulis yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Sufyan

NIM : 090710101186

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul:

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN OTONOMI DAERAH MENYANGKUT KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI KECAMATAN SEBAGAI PERANGKAT DAERAH MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 19 TAHUN 2008 TENTANG KECAMATAN adalah benar-benar karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak lain serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 2014

Yang Menyatakan,

Materai 6.000

Ahmad Sufyan
NIM 090710101186

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur Alhamdulillah kehadiran Allah SWT atas segala limpahan rahmat, dan keridhoan-Nya, sehingga penulis diberikan kekuatan, kemudahan, dan kesabaran dalam mencari sebuah hikmah melalui skripsi yang berjudul: “Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah Menyangkut Kedudukan, Tugas Dan Fungsi Kecamatan Sebagai Perangkat Daerah Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan” hingga selesai. Penulisan skripsi ini guna memenuhi salah satu syarat menyelesaikan Pendidikan Strata Satu (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulisan Skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini penyusun menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Antikowati, S.H., M.H. selaku Pembimbing yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan arahan dalam penulisan skripsi ini hingga mencapai hasil yang maksimal;
2. Ibu Rosita Indrayati, S.H., M.H. selaku Pembantu Pembimbing yang dapat meluangkan waktu selalu sabar dalam memberikan bimbingan dan banyak memberikan arahan dalam penulisan skripsi ini, serta memberikan motivasi bagi penulis;
3. Ibu R.A Rini Anggraini S.H.,M.H. selaku Ketua Penguji yang telah memberikan kritik, saran, masukan, dan ilmu yang sangat bermanfaat bagi penulis untuk perbaikan penulisan skripsi ini;
4. Bapak Ida Bagus Oka Ana S.H.,M.M selaku Sekretaris Penguji yang telah memberikan tambahan ilmu serta masukan yang sangat bermanfaat bagi penulis;
5. Bapak Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, beserta jajaran Pembantu Dekan I, Pembantu Dekan II, dan Pembantu Dekan III;

6. Ibu Dra.Tutik Patmiati, selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan dan motivasi kepada penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Bapak dan Ibu Dosen yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan selama penulis mengikuti kegiatan perkuliahan;
8. Kedua orangtua penulis, Bapak Ahmad Ja'far S.Ag dan Ibu Siti Yakuti yang penulis hormati dan cintai, terimakasih yang tak terhingga atas segala bimbingan, doa dan kasih sayang yang telah diberikan kepada penulis.
9. Kakak saya, Arifatussholiha dan adik saya, Tri Amalia Lestari yang penulis cintai, terimakasih yang tak terhingga atas segala doa dan kasih sayang yang telah diberikan kepada penulis;
10. Sahabat-sahabat terbaikku seperjuangan, Aldis Ruly, Edo Adi, Wendi Apriadi, Aditya Sakti, Tri Ardi, Prasasto Yuwono, Alvin Eka, Ryan Dwi Ananta,Mas Rizal terimakasih atas luapan canda dan semangat serta segala bantuan terhadap penulis mulai masa perkuliahan sampai Skripsi ini selesai;
11. Teman-temanku seperjuangan dalam Kuliah Kerja Mahasiswa di Kecamatan Balung Jember,,: Ryan Dwi Ananta,Edo Adi P.,Alvin Eka.
12. Sahabatku di MAN Negeri 2 Jember Ilham Kistanto,Said Ali wafi,Sukron Zazillah,Zainuddin,Bayu, dan semua teman-teman seangkatan;
13. Teman-teman Fakultas Hukum Angkatan 2009 yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Terima kasih untuk semua semangat dan dukungan yang diberikan kepada penulis.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan balasan pahala yang baik dan berkah bagi kita semua dan mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Jember, 2014

Penulis

RINGKASAN

Sejalan dengan dikeluarkannya undang-undang yang mengatur tentang otonomi daerah baik pada Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 yang kemudian direvisi menjadi Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, maka implementasi kebijakan otonomi daerah telah mendorong terjadinya perubahan, baik secara struktural, fungsional maupun kultural dalam tatanan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Salah satu perubahan yang sangat esensial yaitu menyangkut kedudukan, tugas pokok dan fungsi kecamatan yang sebelumnya merupakan perangkat wilayah dalam kerangka asas dekonsentrasi, berubah statusnya menjadi perangkat daerah dalam kerangka asas desentralisasi. Sebagai perangkat daerah, Camat dalam menjalankan tugasnya mendapat pelimpahan kewenangan dari dan bertanggung jawab kepada bupati/walikota.

kewenangan kecamatan serta tugas pokok dan fungsi kecamatan secara detail, namun dalam pelaksanaannya dilapangan masih banyak kewenangan yang telah diberikan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi ataupun pemerintah kabupaten/kota yang tidak sesuai. Hal ini dapat dilihat dari kecilnya wewenang yang diberikan kepada kecamatan dalam melaksanakan tugasnya di kecamatan. Seharusnya pelimpahan wewenang yang besar pada kecamatan akan dapat memberikan sumbangan yang besar pada pembangunan daerah baik secara fisik maupun sumber daya manusianya.

Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui dan memahami bentuk Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah Menyangkut Kedudukan, Tugas Dan Fungsi Kecamatan Sebagai Perangkat Daerah Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan,serta untuk mengetahui Yang ideal fungsi serta kedudukan camat dalam pemerintahan daerah terkait pelayanan kepada publik. Metode penulisan skripsi ini adalah yuridis normatif (*legal research*) yang menggunakan pendekatan perundang-undangan (*legal approach*) dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*). Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder. Metode analisis dalam penelitian ini menggunakan analisis deduktif.

Ada 2 (dua) rumusan masalah yang dianalisis dalam skripsi ini. Pertama, Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah Menyangkut Kedudukan, Tugas Dan Fungsi Kecamatan Sebagai Perangkat Daerah Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan. Kedua, Yang ideal fungsi serta kedudukan camat dalam pemerintahan daerah terkait pelayanan kepada publik.

Saran yang diajukan dalam penulisan skripsi ini adalah Kedepannya camat dan kecamatan diharapkan mendapat kewenangan lebih dalam melakukan pelayanan, hal ini disebabkan belum bisanya pemerintah kabupaten turun secara langsung melakukan pelayanan kepada masyarakat. Di samping itu, pemerintahan aparaturnya desa/kelurahan belum memiliki kecakapan yang mumpuni dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat. Namun perlu dicatat juga bahwa wilayah kecamatan perlu mendapatkan sumber dana, SDM dan infrastruktur yang memadai dalam melakukan pelayanan terhadap masyarakat. serta aparaturnya Kecamatan harus diperkuat baik dari segi manusianya maupun dari segi kelembagaan dan tata kerjanya. Dari segi manusianya, memerlukan perubahan terhadap *mind set*, wawasan, mental dan perilaku serta semangat kerjanya, sedangkan dari segi kelembagaan dan tata kerja harus diarahkan kepada pencapaian efektifitas dan efisiensi dalam memberikan pelayanan maupun menyelesaikan program yang telah digariskan.

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Sampul Depan	i
Halaman Sampul Dalam	ii
Halaman Motto	iii
Halaman Persembahan	iv
Halaman Prasyarat Gelar	v
Halaman Persetujuan	vi
Halaman Pengesahan	vii
Halaman Penetapan Panitia Penguji	viii
Halaman Orisinalitas	ix
Halaman Ucapan Terima Kasih	x
Halaman Ringkasan	xiii
Halaman Daftar Isi	xv
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian	4
1.3.1 Tujuan Penelitian	4
1.3.2 Manfaat Penelitian	4
1.4 Metode Penelitian	5
1.4.1 Tipe Penelitian	5
1.4.2 Pendekatan Masalah.....	5
1.4.3 Sumber Bahan Hukum.....	6
1.4.4 Analisis Bahan Hukum	7
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA.....	9
2.1 Pemerintahan Daerah.....	9
2.1.1 Pengertian Pemerintahan Daerah.....	9

2.1.2 Asas-Asas Pemerintahan Daerah.....	10
2.2 Otonomi Daerah.....	18
2.2.1 Prinsip Dasar Otonomi Daerah.....	18
2.2.2 Tujuan Otonomi Daerah.....	20
2.3 Kecamatan.....	22
2.3.1 Pengertian Camat.....	22
2.3.2 Pengertian Kecamatan.....	23
2.3.3 Kedudukan, Tugas dan Fungsi Camat.....	24
BAB III : PEMBAHASAN.....	26
3.1 Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah Menyangkut Kedudukan, Tugas Dan Fungsi Kecamatan Sebagai Perangkat Daerah Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan.....	26
3.2 Yang ideal fungsi serta kedudukan camat dalam pemerintahan daerah terkait pelayanan kepada publik	34
3.2.1 Tanggung Jawab Camat.....	36
3.3.2 Posisi Camat yang Ideal	38
BAB IV : PENUTUP.....	39
4.1 KESIMPULAN.....	40
4.2 SARAN.....	41
DAFTAR PUSTAKA.....	42